Strategi perlindungan hak paten intelektual komunal di indonesia

Lidya wahyuni

155100042, 785567846

Fakultas Komputer

lidyawahyuni.student@umitra.ac.id

Abstract

Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN membutuhkan persiapan yang nyata, salah satunya dalam pembangunan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan fundamental perekonomian suatu bangsa. Hak Kekayaan Intelektual merupakan asset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang. Banyak hambatan yang ditemui dalam penerpan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang disebabkan karena perbedaan karakteristik masyarakat lokal dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual yang ada. Perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam rangka membentuk sistem Hak Kekayaan Intelektual yang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi di era pasar bebas ASEAN yang berbasis kekayaan intelektual.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Ekonomi

A. INTRODUCTION

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) perlu ada persiapan yang matang dari negara Indonesia. Dilihat dari dunia usaha, persaingan sehat adalah syarat utama dalam memasuki MEA 2015. Persaingan sehat harus diciptakan dan dikawal dengan ketat agar tidak merugikan dunia usaha di Indonesia. Salah satu lembaga yang terus gencar

mengawasi 165 Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015 persaingan usaha di Indonesia adalah KPPU. Melalui KPPU diharapkan pengawasan dunia usaha dapat berjalan dengan baik.

Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, para pengusaha akan mengalami persaingan usaha yang semakin kompleks dalam dunia usaha, sehingga dimungkinkan akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi antar pengusaha lokal maupun asing. Kesadaran tentang pentingnya memperhatikan kesiapan MEA 2015 adalah kewajiban utama, karena jika tidak diantisipasi dan tidak dipersiapkan, maka MEA 2015 berpotensi menciptakan instabilitas terhadap perekonomian nasional, bahkan dapat merupakan ajang pencaplokan aset-aset ekonomi penting milik negara.¹ Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.² Setiap pelaku usaha hendaknya berada dalam kondisi persaingan usaha yang

1 Otjih Sewandarijatun, "Siapkah kita Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean", <http://leuserantara.com/artikel-siapkah-kita-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015/> diakses tanggal 3 Oktober 2014. 2 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 5.

sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tujuan agar dapat mendorong pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar secara wajar.³ Indonesia, sebagai Negara berkembang memiliki kebijakan strategis dalam rangka perlindungan HKI guna menghadapi persaingan bebas di Negara-negara anggota ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar yang akan menyatu dan berintegrasi dalam satu pasar bersama. Perlindungan HKI sangat dibutuhkan terutama yang terdapat pada produk yang dihasilkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) baik yang dipasarkan di dalam maupun di dalam negeri. Masyarakat pelaku usaha membutuhkan campur tangan pemerintah melalui undang-undang untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, agar dalam situasi kompetitif seperti sekarang tidak terjadi aspek-aspek negatif dimana pelaku usaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman, terampil dan cepat berkembang, tidak total menguasai pasar yang dapat menghalangi tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kecil untuk maju.⁴ Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan 3 Suhasril dan

Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. Vii. 4 Ibid., hlm. viii. 166 Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015 segera berlaku efektif akhir 2015 akan berdampak besar pada pengusaha kecil di Indonesia. Para pengusaha kecil perlu adanya jaminan persaingan usaha yang sehat dalam menjalankan usahanya dan juga terobosan dari pemerintah dalam melindungi para pengusaha kecil dan menengah agar dapat bertahan dalam persaingan usaha dengan para pengusaha asing. Dalam hal ini Indonesia perlu adanya peningkatan ekonomi yang berbasis pengetahuan agar dapat bersaing dengan Negara-negara lain melalui persaingan usaha yang sehat. Menurut Mudrajat Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) bahwa persaingan antarpelaku bisnis, baik dari luar maupun dalam negeri akan semakin ketat pada saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada 2015. Hal itu seiring dengan dibukanya kran bisnis

usaha dari luar negeri untuk bersaing di Indonesia saat MEA berlangsung. Persaingan usaha akan semakin ketat. Produk dari luar negeri akan bebas bersaing di Indonesia. Menurut beliau, meskipun Indonesia turut serta dalam MEA, seyogianya persaingan produk usaha kecil dan besar tetap harus dijaga agar dapat bersaing secara sehat.⁵ Bila dikaitkan dengan isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 5 Tasrief Tarmizi (Editor), "KPPU Perlu Diperkuat Jelang MEA 2015", <http://www.antaranews.com/berita/428614/kppu-perlu-diperkuat-jelang-mea-2015> diakses tanggal 3 Oktober 2014. pada saat ini maka akan ditemukan sebuah kaitan antara dunia usaha (hukum persaingan usaha) dengan HKI. Dunia usaha dalam perkembangannya tidak terlepas dari Hukum HKI. Dunia usaha membutuhkan perlindungan akan produknya dan apa saja yang berkaitan dengan produknya, misalnya merek dari sebuah produk, desain sebuah produk dan lain sebagainya, yang perlu dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain demi keuntungannya sendiri dan merugikan pemilik hak tersebut. Kemajuan ekonomi suatu Negara juga dapat dilihat dari banyaknya perlindungan HKI yang dimilikinya. Implementasi perlindungan HKI di Indonesia banyak menemui kendala yang

disebabkan oleh berbedanya karakter budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dengan karakter dari rezim HKI yang bersifat individual. Untuk itu perlu adanya perlindungan dan perbaikan dalam rezim HKI yang ada di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sehingga, apabila rezim HKI yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan. Dari uraian di atas terdapat beberapa hal yang perlu dikaji yaitu bagaimana peran Hukum HKI kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha? Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan HKI di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut agar perlindungan HKI dapat menjadi 167 Sigit Nugroho, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2, Agustus 2015 jalan untuk peningkatan pembangunan ekonomi di era pasar bebas ASEAN? PEMBAHASAN Peran Hukum HKI kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha Hukum dalam bidang kekayaan intelektual ini meliputi hak komunal dan hak personal.

Perlindungan yang dilakukan pada kedua hak tersebut masih banyak mengalami kendala. Hal tersebut perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah beserta para pemangku kepentingan dan harus ada solusi nyata yang harus dilakukan untuk menyambut pasar bebas ASEAN ke depan. Perlu adanya terobosan dalam bidang hukum untuk dapat memproteksi perekonomian Indonesia yang salah satunya melalui perlindungan kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. Hukum dalam bidang kekayaan intelektual dengan hukum persaingan usaha ini merupakan komplementer, melengkapi atau saling mengisi. Perkembangan pasar bebas tanpa disadari secara langsung telah memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Peluang itu adalah peluang untuk berlomba-lomba memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan, melampaui batas wilayah suatu negara secara lebih cepat, lebih mudah, dan dengan harga yang sangat murah. Sehingga dapat menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan.⁶ Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. HKI merupakan fundamental perekonomian

suatu bangsa.⁷ Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak HKI yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

B. CONTENT

Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang tidak mudah dalam menerapkan rezim HKI. Sebab, Indonesia mempunyai kekhasan dalam karakteristik masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya.²⁵ Seperti halnya kebiasaan tolong menolong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat lokal seperti di Indonesia. Ciri ini boleh jadi bersumber pada etika kebatinan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, yang antara lain dirumuskan dengan kata-kata *sepi ing pamrih, rame ing gawe, mamayu hayuning bawono*.²⁶ Kata *sepi ing pamrih* diartikan sebagai tidak mementingkan diri sendiri atau tidak dikendalikan oleh hasrat demi keuntungan pribadi. Kata *rame ing gawe* diartikan sebagai ²⁵Agus Sardjono, Op.Cit., hlm. 132. ²⁶Niel Mulder, *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), Hlm. 59 dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan intelektual dan Pengetahuan Tradisional*,

Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 132. aktif atau bahkan penuh semangat untuk melakukan perbuatan yang baik demi kemaslahatan semua orang.²⁷ Sedangkan kata *mamayu hayuning bawono* diartikan untuk memperindah atau menghiasi dunia.²⁸ Tujuan kebatinan dari filsafat ini adalah mencapai kesatuan dengan “realitas tertinggi”, membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan dengan cara mengatasi diri sendiri. Meskipun jalan menuju pencapaian itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah dasar duniawi, seperti menghormati tatanan sosial, tetapi semuanya itu bertujuan melepaskan diri manusia dari segala ikatan duniawi.²⁹ Selain itu juga ada sistem tolong menolong dan gotong royong. Konsep gotong royong merupakan suatu konsep yang erat bersangkut paut dengan kehidupan rakyat di dalam masyarakat agraris.³⁰ Kebiasaan tolong menolong tampak dalam aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Beberapa contoh karakteristik masyarakat di atas merupakan karakter ²⁷ Agus Sardjono, Op.cit., hlm. 132. ²⁸ Ibid., hlm. 133. ²⁹ Niel Mulder, *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), Hlm. 59 dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung : PT. Alumni, 2006, hlm. 133.

30Koentjaraningrat,
Kebudayaan Mentalitet dan
Pembangunan, (Gramedia,
1979), 59, dalam Agus
Sardjono, Hak Kekayaan
intelektual dan Pengetahuan
Tradisional, Bandung: PT.
Alumni, 2006,

C. CONCLUSION

Hukum HKI dengan Hukum
Persaingan Usaha saling
berkaitan, saling melengkapi
satu sama lain. Iklim
persaingan usaha yang sehat
dan didukung oleh
perlindungan Hak atas
Kekayaan Intelektual dalam
dunia usaha akan dapat
meningkatkan pembangunan
ekonomi Indonesia sebagai
negara berkembang ke
depannya. Semakin banyak
HKI dalam negeri yang
dimiliki oleh Indonesia maka
akan sangat mendukung
potensi peningkatan dunia
usaha yang lebih baik dalam
persaingannya di era pasar
bebas ASEAN. Produk dalam
negeri akan dapat bersaing
dengan produk luar, sehingga
akan tercipta kesejahteraan
bagi masyarakat lokal. 49
Henry W. Ehrmann,
Comparative Legal Culture,
(Englewood Clif, N. J: Prentice
Hall, Inc 1976) hlm. 9.
Lawrence M. Friedman,
American Law. (New York: W.
W. Norton & Company:1984),
hlm. 6-7, 218-224, Erman
Rajagukguk, Nyanyian Sunyi
Kemerdekaan Menuju
Indonesia Negara Hukum
Demokratis. (Tetes-tetes

Pemikiran 1971-2006), hlm.
213. dalam Ansori Sinungan,
Perlindungan Desain Industri:
Tantangan dan Hambatan
dalam Praktiknya di Indonesia,
Cetakan ke- 1, Bandung:
Alumni, 2011, hlm. 500.
Dalam penerapan HKI di
Indonesia tentunya tidak
berjalan mulus. Hal tersebut
disebabkan karena adanya
perbedaan karakteristik rezim
HKI dengan karakteristik
budaya masyarakat lokal.
Karakteristik rezim HKI
bersifat individualistik
sedangkan karakteristik
masyarakat lokal bersifat
komunal. Hal tersebut
membuat HKI mengalami
kendalam dalam penerapannya
di Indonesia. Akan tetapi, perlu
adanya solusi penengah atau
perbaikan dalam bidang HKI
untuk dapat menjembatani
permasalahan tersebut.
Perbaikan-perbaikan pada
konsep perlindungan HKI yang
ada sekarang perlu dilakukan.
Perbaikan tersebut meliputi
pembenahan dalam perundang-
undangan dan terobosan
kebijakan yang dapat
mengakomodir kepentingan
lokal, pendokumentasian
terhadap kekayaan intelektual
Indonesia, peran aktif dan
saling bersinerginya antara
pemerintah dan para pemangku
kepentingan dalam bidang
HKI, perbaikan dalam
kelembagaan, membangun
budaya hukum bagi
masyarakat. Perbaikan tersebut
perlu dilakukan dengan

komitmen yang kuat untuk memperbaiki segala kelemahan perlindungan HKI yang ada saat ini.

D. DISCUSSION

Dalam menyelesaikan permasalahan HKI ini perlu adanya peran aktif dari para pemangku kepentingan. Komitmen bersama para pemangku kepentingan menjadi modal dasar dalam perubahan rezim HKI yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Sudarmanto, beliau membagi para pemangku kepentingan menjadi 4 (empat) yaitu pelaku, pelatih, promotor dan wasit. Keempat kelompok pemangku kepentingan tersebut harus bersinergi dengan baik untuk dapat melindungi kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaku adalah pendesain, penemu, pencipta, pemohon HKI, pengrajin, masyarakat industri, pelaksana HKI, dan lain-lain. Pelatih adalah kementerian, non kementerian, dinas, pemda terkait, perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian, konsultan HKI, dan lain sebagainya. Promotor terdiri dari asosiasi (kerajinan, industri dan perdagangan), kadin, pengusaha/inventor, LSM, dan lain sebagainya. Sedangkan wasitnya adalah kantor HKI, pengadilan, mahkamah agung, polisi, dan jaksa.⁴³ Perbaikan kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau

hambatan dalam implementasi perlindungan HKI di Indonesia, ialah dengan melakukan kajian terhadap semua unsur dari kelembagaan, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴⁴ Berhubungan dengan kajian terhadap semua unsur dari kelembagaan, dapat dilakukan revitalisasi sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan tertib administrasi untuk peningkatan pelayanan. Salah satu komponen suksesnya implementasi perlindungan HKI tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang akan melaksanakan proses pengadministrasian permohonan pendaftaran HKI pada Ditjen HKI. Perlu adanya peningkatan etos kerja agar dapat lebih produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip good governance.⁴⁵ Dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan luas terhadap HKI

E. REFERENCE

- [1] O. M. Febriani and A. S. Putra, "Sistem Informasi Monitoring Inventori Barang Pada Balai Riset Standardisasi Industri Bandar Lampung," *J. Inform.*, vol. 13, no. 1, pp. 90–98, 2014.
- [2] A. S. Putra, "Paperplain: Execution Fundamental Create Application With Borland Delphi 7.0 University Of Mitra Indonesia," 2018.
- [3] A. S. Putra, "2018 Artikel Struktur Data, Audit Dan Jaringan Komputer," 2018.
- [4] A. S. Putra, "ALIAS MANAGER USED IN DATABASE DESKTOP STUDI CASE DB DEMOS."
- [5] A. S. Putra, "COMPREHENSIVE SET OF PROFESSIONAL FOR DISTRIBUTE COMPUTING."
- [6] A. S. Putra, "DATA ORIENTED RECOGNITION IN BORLAND DELPHI 7.0."
- [7] A. S. Putra, "EMBARCADERO DELPHI XE 2 IN GPU-POWERED FIREMONKEY APPLICATION."
- [8] A. S. Putra, "HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM DUNIA TEKNOLOGY BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0."
- [9] A. S. Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN UU. NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI BERBASIS INFORMATION TECHNOLOGY."

- [10] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF PARADOX DBASE."
- [11] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET CASE STUDY SAMSUNG MOBILE PHONE."
- [12] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION PATENT FOR APPLICATION WEB BASED CASE STUDI WWW. PUBLIKLAMPUNG.COM."
- [13] A. S. Putra, "IMPLEMENTATION SYSTEM FIRST TO INVENT IN DIGITALLY INDUSTRY."
- [14] A. S. Putra, "MANUAL REPORT & INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT BORLAND DELPHI 7.0."
- [15] A. S. Putra, "PATENT AS RELEVAN SUPPORT RESEARCH."
- [16] A. S. Putra, "PATENT FOR RESEARCH STUDY CASE OF APPLE. Inc."
- [17] A. S. Putra, "PATENT PROTECTION FOR APPLICATION INVENT."
- [18] A. S. Putra, "QUICK REPORT IN PROPERTY PROGRAMMING."
- [19] A. S. Putra, "REVIEW CIRCUIT LAYOUT COMPONENT REQUIREMENT ON ASUS NOTEBOOK."
- [20] A. S. Putra, "REVIEW TRADEMARK PATENT FOR INDUSTRIAL TECHNOLOGY BASED 4.0."
- [21] A. S. Putra, "TOOLBAR COMPONENT PALLETTE IN OBJECT ORIENTED PROGRAMMING."
- [22] A. S. Putra, "WORKING DIRECTORY SET FOR PARADOX 7."
- [23] A. S. Putra, "ZQUERY CONNECTION IMPLEMENTED PROGRAMMING STUDI CASE PT. BANK BCA Tbk."
- [24] A. S. Putra, D. R. Aryanti, and I. Hartati, "Metode SAW (Simple Additive Weighting) sebagai Sistem Pendukung Keputusan Guru Berprestasi (Studi Kasus: SMK Global Surya)," in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 85–97.
- [25] A. S. Putra and O. M. Febriani, "Knowledge Management Online Application in PDAM Lampung Province," in *Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)*, 2018, pp. 181–187.
- [26] A. S. Putra, O. M. Febriani, and B. Bachry, "Implementasi Genetic Fuzzy System Untuk Mengidentifikasi Hasil Curian Kendaraan Bermotor Di Polda Lampung," *SIMADA (Jurnal Sist. Inf. dan Manaj. Basis Data)*, vol. 1, no. 1, pp. 21–30, 2018.
- [27] A. S. Putra, H. Sukri, and K. Zuhri, "Sistem Monitoring Realtime Jaringan Irigasi Desa (JIDES) Dengan Konsep Jaringan Sensor Nirkabel," *IJEIS (Indonesian J. Electron. Instrum. Syst.)*, vol. 8, no. 2, pp. 221–232.

- [28] D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 289–294.